

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada di ujung timur Indonesia. Provinsi Maluku sendiri berbatasan dengan Laut Seram dan Provinsi Maluku Utara di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Indonesia dan Laut Arafura di bagian Selatan, di bagian timur Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Papua, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi, serta Timur Leste dan Australia<sup>1</sup>. Luas total keseluruhan wilayah provinsi Maluku adalah 646.295 km<sup>2</sup> dengan luas lautan adalah 90 % dari total luas wilayah keseluruhan<sup>2</sup>. Perbandingan antara luas daratan dan lautan di Provinsi Maluku adalah 1 : 9, mengindikasikan Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan basis kemaritiman karena luas perairan yang sangat signifikan. 10 % yang merupakan wilayah daratan terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil, yang terbentang dari ujung utara yang berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara sampai ke ujung selatan yang berbatasan dengan Laut Indonesia, Laut Arafura, Timor Leste dan Australia.

Dianugerahi lautan yang begitu luas, Provinsi Maluku menyimpan sumber daya maritim yang berlimpah mulai dari sumber daya ikan sampai yang non ikan. Menurut data statistik perikanan Provinsi Maluku tahun 2011, luas area terumbu karang di Provinsi Maluku mencapai 1.323,34 km<sup>2</sup>, dengan 1.412 total pulau, panjang garis pantai mencapai 10.662, 92 km<sup>2</sup>. Menurut data statistik perikanan tahun 2015, total hasil tangkapan ikan di wilayah Provinsi Maluku mencapai 617.985 ton tertinggi se Indonesia. Maluku memang telah sejak lama menjadi destinasi bagi kapal-kapal asing penangkap ikan karena perairan Maluku tercatat memiliki potensi perikanan

---

<sup>1</sup> *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk Mendukung Industrialisasi KP*, Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses pada 23 Januari 2019 11.46 WIB, dalam [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/154359-\[Konten\]-Konten%20D546.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/154359-[Konten]-Konten%20D546.pdf)

Lihat <http://www.malukuprov.go.id/index.php/selayang-pandang/2016-10-06-01-18-19>

<sup>2</sup> *Ibid*

sebesar 3.055.504 ton/tahun, dengan total potensi perikanan perairan Arafura mencapai 1.992.731 ton/tahun<sup>3</sup> yang kebetulan berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Aru. Total jumlah potensi perikanan ini sangat besar bila dibandingkan dengan potensi perikanan Negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dengan potensi perikanan yang begitu banyak provinsi Maluku provinsi yang paling menjadi menarik untuk dijadikan tempat persinggahan bagi kapal-kapal pencari ikan terutama kapal-kapal asing yang berasal dari negara-negara ASEAN. Salah satunya kapal-kapal pencari ikan dari Thailand, yang bernaung di bawah perusahaan Thailand yakni PT. Pusaka Benjina Resources.

Beberapa tahun lalu, *Associated Press* pada Maret 2015 mempublikasikan artikel berjudul “*Slaves May Have Caught The Fish You Bought*” yang berisikan investigasi terhadap kegiatan perbudakan ribuan orang di desa Benjina Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina. Para pekerja yang dieksploitasi ini sebagian besar datang dari tiga Negara tetangga yakni Myanmar, Thailand, dan Laos. Menurut pemberitaan *Associated Press*, sejumlah pekerja dikurung di dalam ruang yang lebih menyerupai kandang hewan.

Menurut penuturan beberapa pekerja asal Myanmar yang berhasil diwawancarai, mereka telah bekerja bertahun-tahun tanpa dibayar, tanpa diberi cukup makanan, dan yang lebih mengesankan mereka dipaksa bekerja selama 18-22 jam tanpa istirahat. Jika mereka memprotes dan melawan perintah pimpinan atau kapten kapal, maka mereka tidak akan segan-segan untuk dipukul, disiksa, dan dikurung. Menurut penuturan para saksi sudah ada ratusan orang yang mati di atas kapal dan mayatnya dibuang di perairan Laut Arafura. Sebagian lain dikubur di desa Benjina, mereka tewas baik karena sakit, karena disiksa majikan. *Associated Press* / AP menemukan banyak nisan dalam berbagai nama asing di desa Benjina yang

---

<sup>3</sup> M.Ambari, *Kaya Tapi Miskin ; Potret Potensi Perikanan Maluku yang Belum Optimal ; Kenapa ?*,Mongabay ; Situs Berita Lingkungan edisi 15 Februari 2018, diakses pada 3 Desember 2018 9.06 WIB, dalam <http://www.mongabay.co.id/2018/02/15/kaya-tapi-miskin-potret-potensi-perikanan-maluku-yang-belum-optimal-kenapa/>

disinyalir merupakan kuburan-kuburan para budak yang tewas selama bekerja pada perusahaan penangkapan ikan asal Thailand yakni PT. PBR<sup>4</sup>.

PT. Pusaka Benjina Resources beroperasi di desa Benjina yang merupakan salah satu desa dari kabupaten Kepulauan Aru-Maluku, kecamatan Aru Tengah. Perusahaan ini memiliki 101 kapal yang beroperasi namun hanya sekitar 96 unit yang memiliki izin<sup>5</sup>. PT. Pusaka Benjina dilaporkan tidak hanya karena keterlibatannya dalam kasus perbudakan orang namun perusahaan tersebut juga terlibat dalam kasus *illegal fishing*<sup>6</sup>.

Tingginya permintaan atas produk-produk perikanan menjadi salah satu penyebab tumbuh dan berkembangnya praktek perbudakan maritim. Tingginya permintaan atas produk perikanan membuat para pemilik modal berlomba-lomba mencari kawasan yang memiliki potensi perikanan yang berlimpah dengan sistem penjagaan keamanan perairan yang rendah. Pemilik modal ini juga berupaya untuk mendapatkan pekerja yang bisa diupah murah, atau bahkan tidak diupah sama sekali agar biaya produksi dapat ditekan, untuk itu para pemilik modal cenderung memilih pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dengan kondisi ekonomi keluarga yang buruk agar lebih mudah dibohongi seperti yang terjadi pada kasus perbudakan di Benjina<sup>7</sup>.

Andrew Crane berpendapat bahwa ketertarikan *enterprises* untuk menggunakan budak sebagai tenaga kerja, juga dipengaruhi oleh *setting* geografis<sup>8</sup>. Kebanyakan

---

<sup>4</sup> McDowell, et.al., *AP Investigation : Slaves May Have Caught The Fish You Bought*, Associated Press 25 Maret 2015, diakses pada 28 November 2018 15.32 WIB, dalam <https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html>

<sup>5</sup> Pebriansyah Ariefana, *Ini Data Lengkap Milik Benjina*, Suaradotcom Edisi 9 April 2015, diakses pada 3 Desember 2018 12.37 WIB, dalam <https://www.suara.com/news/2015/04/09/060300/ini-data-lengkap-kapal-milik-benjina>

<sup>6</sup> Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, Laporan diterbitkan atas kerjasama KKP, IOM, dan University of Coventry, diakses pada 3 Desember 2018 12.45 WIB, dalam [http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/01/8-IOM\\_KKP\\_Coventry\\_INDO\\_hires-min.pdf](http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/01/8-IOM_KKP_Coventry_INDO_hires-min.pdf)

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Andrew Crane, *Modern Slavery As A Management Practice : Exploring The Conditons And Capabilities For Human Exploitation*, Academy of Management Review 2013, Vol. 38 (1), hal. 45-69, diakses pada 7 Januari 2019 16.01 WIB, dalam

sumber utama dari perikanan, pertanian, maupun perkebunan berada di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi, wilayah yang terisolasi akan mempengaruhi harga pasaran tenaga kerja menjadi lebih mahal (upah yang diminta pekerja menjadi mahal karena lokasi kerja yang terpencil). Situasi ini bertolak belakang dengan keinginan *enterprises* untuk meminimalisir biaya produksi menjadi seefisien mungkin. Dalam teori yang dirumuskan Crane menyatakan bahwa *setting* geografis menjadi salah satu faktor yang membentuk motivasi bagi perusahaan untuk menggunakan budak dalam proses produksi yang mereka lakukan.

Indikator geografis yang ada pada teori perbudakan modern sebagai praktek manajemen milik Crane, merupakan salah satu indikator dari lima indikator yang terdapat dalam teori tersebut. Dengan digunakannya indikator geografis, cukup meyakinkan penulis bahwa aspek geografis berperan cukup penting sebagai salah satu pertimbangan perusahaan untuk melakukan praktek perbudakan modern dalam suatu wilayah. Penulis berpikir bahwa situasi geografi politik Indonesia khususnya kebijakan pengamanan perairan bagian Indonesia timur tidak begitu optimal. Apalagi dengan berlimpahnya sumber daya perairan, pemerintah diharapkan lebih berusaha maksimal untuk melindungi sumber daya tersebut agar tidak mudah dicuri. Ketidakefektifan pengamanan perairan menciptakan peluang bagi aktor non-negara misalnya perusahaan untuk melakukan tindak pidana perbudakan. Fenomena ini mencerminkan adanya jalur terstruktur di wilayah kawasan yang menjadi jalur perdagangan orang. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan orang-orang dari negara ASEAN sendiri baik yang menjadi pelaku utama, korban, maupun negara yang dijadikan lokasi terjadinya tindak pidana, kesemuanya merupakan negara yang berada dalam satu kawasan yang sama juga terletak saling berdekatan.

Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis kasus perbudakan modern ini dengan menggunakan pendekatan geografi politik yang mana dalam aspek geografinya juga menyentuh bagian yang dijelaskan Anderw Crane dalam teori perbudakan modern miliknya. Penulis yakin pendekatan geografi politik mampu

---

[https://modernslavery.yale.edu/sites/default/files/pdfs/crane\\_modern\\_slavery\\_as\\_management\\_practice\\_0.pdf](https://modernslavery.yale.edu/sites/default/files/pdfs/crane_modern_slavery_as_management_practice_0.pdf)

melihat relevansi antara *setting* geografi dari wilayah perairan Kepulauan Aru yang terisolasi dan kaya akan sumber daya perikanan yang secara alami membentuk peluang bagi terbentuknya lokasi tujuan perbudakan serta bagaimana keberlimpahan sumberdaya alam tersebut secara geografi politik membuat wilayah Indonesia menjadi *vulnerable* atau rentan atas ancaman ketidakamanan dari luar misalnya praktek ilegal *human trafficking* dan perbudakan yang dilakukan oleh aktor non negara.

Kedua, Penulis menilai bahwa praktek perbudakan yang tumbuh selama beberapa tahun tersebut mengindikasikan lemahnya sistem keamanan di wilayah perairan terluar di perairan Kepulauan Aru yang secara geografis terpencil dan jauh sehingga memungkinkan praktek perbudakan setidaknya terus berjalan hingga tahun 2015 saat kasus tersebut terungkap. Akhirnya penulis berharap teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis dapat menghasilkan evaluasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia agar ke depannya dapat melakukan perubahan pada strategi pembangunan dan pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa kasus perbudakan tumbuh dan berkembang di wilayah Benjina Kabupaten Kepulauan Aru Maluku ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Untuk menjelaskan latar belakang tumbuh dan berkembangnya praktek perbudakan orang di wilayah perairan Maluku.

## **1.4 Kontribusi Riset**

### **1.4.1 Kontribusi Praktis**

- a. Tesis ini dapat membantu pemerintah Indonesia secara umum dan pemerintah Provinsi Maluku secara khusus untuk mengetahui penyebab muncul dan tumbuhnya praktek perbudakan orang sehingga dapat membantu pemerintah guna menyusun strategi pencegahan agar praktek perbudakan orang tidak lagi terjadi di kemudian hari.
- b. Dengan mengetahui faktor geografi politik yang berpengaruh dalam munculnya praktek perbudakan, serta peluang Indonesia sebagai lokasi tujuan strategis bagi praktek perdagangan orang yang berujung perbudakan, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengamanan terhadap wilayah-wilayah yang secara geografis rentan terhadap aktifitas ilegal terutama pada wilayah perairan terdepan Indonesia yang sering menjadi jalur keluar masuk kapal-kapal asing.

### **1.4.2 Kontribusi Akademik**

- a. Tesis ini dapat menjadi acuan bagi studi tentang perbudakan maritim modern yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.
- b. Tesis ini juga dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran tentang isu perbudakan maritim modern yang terjadi di wilayah Indonesia Timur.
- c. Tesis ini dapat memberikan refleksi tentang pentingnya memperhatikan unsur-unsur geografis wilayah dalam pembuatan kebijakan politik terkait wilayah tersebut, terutama yang berkaitan dengan kebijakan keamanan.

## **1.5 Studi Pustaka**

Defenisi tentang perbudakan modern pertama kali muncul dalam konvensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1926 tentang perbudakan, dikenal dengan *Slavery Convention 1926*, defenisi perbudakan yang tertera dalam pasal 1 tersebut sebenarnya diambil

dari rekomendasi Komisi Perbudakan Sementara atau *Temporary Slavery Commission* yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1922.

“ *the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised*” (Bales : 2005).

Kevin Bales juga mendefinisikan perbudakan modern sebagai situasi yang ditandai dengan hilangnya kebebasan dan hak di mana seorang manusia dipaksa dengan cara kekerasan atau ancaman akan kekerasan untuk menyerahkan haknya dalam memilih di mana ia akan menjual kekuatannya untuk bekerja.

“*slavery is a state marked by the loss of free will in which a person is forced through violence or the threat of violence to give up the ability to sell freely his or her own labor power*” (Bales : 2005)

Dalam buku yang berjudul *Understanding of Global Slavery*, secara umum Bales menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan timbulnya praktek perbudakan modern, setidaknya ada tiga faktor yakni kerapuhan atau ketidakstabilan kondisi ekonomi *economic vulnerability*, ketersediaan populasi *sufficient population*, dan kurangnya kontrol atau batasan atas penggunaan kekerasan *lack of regulation or control over the use of violence*<sup>9</sup>. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dijelaskan oleh Bales setidaknya meliputi tiga aspek besar yakni ekonomi, sosial, dan hukum, yang mana masing-masing menurut Bales berperan dalam menciptakan lahan yang subur bagi tumbuhnya praktek perbudakan modern.

Marie Vlachova dalam tulisannya yang berjudul *Trafficking in Humans : The Slavery of Our Age* secara umum hampir sama dengan pemaparan Bales berkisar seputar faktor-faktor yang secara umum mendorong terjadinya perbudakan, seperti kemiskinan, kemudian kebutuhan Negara-negara industri akan tenaga kerja berupah

---

<sup>9</sup> Kevin Bales, 2005, *Understanding Global Slavery : A Reader*, University of California Press Ltd : London

murah, kemudian latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah yang kemudian membuat mereka rentan terjebak dalam pusaran perdagangan manusia<sup>10</sup>.

Dalam tesis yang ditulis oleh Amanda J Gould dari *University of Denver*, dengan judul *Modern Slavery : A Regional Focus*. Gould, menginisiasi teori baru yang ingin membuktikan bahwa letak suatu kawasan akan mempengaruhi faktor apa yang berperan dalam munculnya praktek perbudakan modern. Gould memberikan beberapa contoh, misalnya di kawasan Eropa yang paling berpengaruh sebagai faktor munculnya praktek perbudakan adalah ketidaksetaraan gender *gender inequality*, hal ini berbeda dengan yang terjadi di kawasan Asia Selatan bagian tengah, menurut Gould banyaknya jumlah pengungsi yang menunjukkan ketidakstabilan kondisi Negara justru menjadi faktor utama lahirnya praktek-praktek perbudakan baru<sup>11</sup>. Menurut penulis yang harus dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan Gould adalah, relevansi antara letak kawasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbudakan.

Andrew Crane dalam tulisan berjudul *Modern Slavery as a Management Practice : Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation* mencoba merumuskan teori perbudakan modern sebagai praktek manajemen<sup>12</sup>. Teori Perbudakan Modern *Crane* memiliki empat indikator besar yakni Industri, Sosial-Ekonomi, Geografi, Budaya, Regulasi, ke empat indikator di atas dinilai Crane sebagai bahan pertimbangan bagi sebuah perusahaan untuk menggunakan budak, atau memulai praktek perbudakan dalam sebuah perusahaan. Penelitian Crane fokus

---

<sup>10</sup> Marie Vlachova, *Trafficking in Humans : The Slavery of Our Age*, Jurnal Connections Vol. 4 (4), Winter 2005, diakses pada 16 Januari 2019 18.19 WIB, dalam <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26323192>

<sup>11</sup> Amanda J Gould, *Modern Slavery : A Regional Focus*, Tesis Faculty of Social Science & Faculty of the Josef Korbel School of International Studies, University of Denver 2010, diakses pada 11 Januari 2019 22.26 WIB, dalam <http://digitalcommons.unl.edu/humtrafconf2/7/>

<sup>12</sup> Andrew Crane, *Modern Slavery As A Management Practice : Exploring The Conditons And Capabilities For Human Exploitation*, Academy of Management Review 2013, Vol. 38 (1), hal. 45-69, diakses pada 7 Januari 2019 16.01 WIB, dalam [https://modernslavery.yale.edu/sites/default/files/pdfs/crane\\_modern\\_slavery\\_as\\_management\\_practice\\_0.pdf](https://modernslavery.yale.edu/sites/default/files/pdfs/crane_modern_slavery_as_management_practice_0.pdf)

pada motif perusahaan untuk melakukan praktek perbudakan terhadap para pekerjanya.

John R Barner, David Okech, dan Meghan A. Camp dengan tulisan yang berjudul *Socio-Economic Inequality, Human Trafficking, and the Global Slave Trade* mencoba menjelaskan peristiwa perbudakan modern yang terjadi dilihat dari perspektif ketidaksetaraan kondisi sosial dan ekonomi di dunia. Menurut Barner, Okech, dan Camp pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih mapan dan stabil akan memiliki *power* yang lebih kuat sehingga mudah bagi mereka untuk mendominasi pihak lain yang berakibat adanya kelompok-kelompok manusia yang diperbudak<sup>13</sup>.

Muhammad Dwibagus Lisandro dan Mohammad Irvan Oliy dalam tulisan yang berjudul *Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia* berusaha menjawab mengapa kasus perbudakan dapat terjadi di wilayah Benjina dengan meninjaunya dari pertimbangan tingginya tuntutan akan produk-produk ikan yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan atas buruh murah ilegal guna mencukupi tuntutan tersebut. Penelitian ini menggunakan perspektif *enterprise* oleh Smith<sup>14</sup>. Secara umum, penelitian ini menganalisis perbudakan modern yang terjadi dalam perspektif *enterprises* yang ingin meningkatkan keuntungannya, kurang lebih hampir sama dengan apa yang pernah dipaparkan Crane dalam tulisannya empat tahun yang lalu.

Yanti Amelia Lewerissa, dalam tulisannya berjudul *Hubungan Illegal Fishing dengan Masuknya Imigran Gelap Sebagai Bentuk Kejahatan Lintas Negara* menganalisis kasus imigran gelap yang dieksploitasi di wilayah Benjina dalam perspektif hukum. Menurut Lewerissa, kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah timur

---

<sup>13</sup> Jhon R barner, et al., *Socio-Economic Inequality, Human Trafficking, and the Global Slave Trade*, Journal Societies Vol. 4, 2014, diakses pada 15 Januari 2019 19.19 WIB, dalam <https://www.mdpi.com/2075-4698/4/2/148/pdf>

<sup>14</sup> Muhammad Dwibagus Lisandro, Mohammad Irvan Oliy, *Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkapan Ikan Asing di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Special Issue Mardjono Awards 2017, diakses pada 12 Februari 2019 19.11 WIB, dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/9660>

Indonesia tidak hanya datang untuk melakukan penangkapan ikan, lebih dari itu mereka juga sekaligus membawa para imigran gelap untuk dijadikan pekerja<sup>15</sup>. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuatnya lebih rentan menjadi tujuan kejahatan transnasional karena memiliki banyak pintu masuk baik dari wilayah perairan, maupun udara. Tulisan Lewerissa, mengulas bagaimana posisi kejahatan transnasional di mata hukum serta penanganannya sekaligus mengulas bagaimana tindakan *illegal fishing* dengan masuknya kapal-kapal asing menjadi transportasi bagi masuknya imigran gelap.

Dalam tulisan Tickler, Meeuwig, Bryant, David, Forrest, Gordon, Larsen, Oh, Pauly, Sumaila, dan Zeller yang berjudul *Modern Slavery and the Race to Fish*, melihat pertumbuhan perbudakan dari peningkatan permintaan akan hasil tangkap perikanan oleh industri-industri pengolahan ikan. Peningkatan tuntutan ini memiliki dampak buruk, salah satunya adalah eksploitasi buruh<sup>16</sup>. Hubungan antara tingginya permintaan dengan pertumbuhan budak diukur dalam tiga tahap, pertama menggunakan model tes linear, kedua menggunakan pendekatan *multivariate clustering*, ketiga menggunakan data COMTRADE dari PBB dan model pengukuran GSI. Pada dasarnya, penelitian Tickler dkk sama dengan penelitian sebelumnya, yang kurang lebih mengandalkan pendekatan ekonomi, yang menunjukkan naiknya permintaan berpengaruh pada peningkatan suplai dari komoditas dalam hal ini budak.

Penulis berpendapat, bahwa sebagian besar penelitian-penelitian yang membahas latar belakang munculnya perbudakan dalam satu wilayah terlalu berfokus pada pertimbangan ekonomi, atau menggunakan pendekatan yang bersifat terlalu umum, tanpa menggunakan perspektif yang lebih spesifik dalam menjelaskan mengapa perbudakan bisa terjadi dan yang paling penting adalah mengevaluasi

---

<sup>15</sup> Yanti Amelia Lewerissa, *Hubungan Illegal Fishing dengan Masuknya Imigran Gelap sebagai Bentuk Kejahatan Lintas Negara*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 (1), 2018, hal. 50-71, diakses pada 12 Februari 2019 21.25 WIB, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25556>

<sup>16</sup> David Tickler, et al., *Modern Slavery and the Race to Fish*, Nature Communications Vol. 9 (4643), 2018, diakses pada 12 Januari 2019 10.12 WIB, dalam <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07118-9>

kebijakan-kebijakan pemerintah yang longgar dan masih lemah sehingga secara tidak langsung memungkinkan perbudakan terjadi. Untuk itulah penulis akan menganalisis fenomena perbudakan yang terjadi di desa Benjina Kepulauan Aru-Maluku dari sudut pandang geografi politik. Penulis ingin melihat bagaimana letak geografis menjadi faktor yang signifikan dalam memicu pertumbuhan perbudakan. Apabila dalam teori perbudakan Crane, ia merujuk pada lima aspek secara umum maka dalam tesis ini penulis akan secara spesifik menggunakan konteks geografi, yang tidak hanya mencakup *setting* geografi yang mempengaruhi pertumbuhan perbudakan lebih dari itu bagaimana *setting* tersebut mempengaruhi strategi pengamanan di wilayah perairan kepulauan Aru yang pada akhirnya menciptakan peluang bagi pertumbuhan perbudakan dalam satu wilayah.

**Tabel 1.**  
**Posisi Penelitian**

No .	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Substansi Penelitian
1	Buku : Kevin Bales  (2005)	Understanding of Global Slavery	- Faktor yang paling signifikan yang mendorong seseorang terjerumus dalam perbudakan modern antara lain kemiskinan, dan <i>vulnerability</i> . Perbudakan modern berfokus pada <i>power</i> untuk menggunakan kekerasan
2	E-Jurnal: Marie Vlachova  (2005)	Trafficking in Humans : The Slavery of Our Age	- Perbudakan dapat terjadi karena tiga faktor yakni kemiskinan, umur, dan gender  - Diperlukan adanya keselarasan antara kebijakan baik

			nasional maupun daerah yang disesuaikan dengan standar internasional dalam memerangi perdagangan orang berujung perbudakan
3	Tesis : Amanda J. Gould (2010)	Modern Slavery : A Regional Focus	-Menguji teori baru yang mengidentifikasi hubungan antara perbedaan kawasan dengan faktor yang melatarbelakangi munculnya perbudakan modern. Jadi beda kawasan akan berbeda pula faktor yang melatarbelakangi tumbuhnya perbudakan di wilayah tersebut
4	E-Jurnal : Andrew Crane (2013)	Modern Slavery as A Management Practice : Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation	- Merumuskan teori perbudakan modern yang dilihat dari perspektif manajemen di mana terdapat 5 pertimbangan yang memotivasi perusahaan dan korporasi untuk merekrut budak. 5 pertimbangan tersebut antara lain, faktor dalam konteks industri, konteks sosial ekonomi, konteks geografi, konteks budaya, konteks peraturan

5	<p>E-Jurnal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- John R. Barner</li> <li>- David Okech</li> <li>- Meghan A. Camp</li> </ul> <p>(2014)</p>	<p>Socio-Economic Inequality, Human Trafficking, and the Global Slave Trade</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaksetaraan sosial ekonomi antar entitas memungkinkan salah satu pihak memiliki lebih banyak kekuatan <i>power</i> dibandingkan yang lain. Pihak dengan kekuatan yang lebih besar, akan lebih mudah mendominasi pihak yang memiliki sedikit atau tidak memiliki kekuatan sama sekali. Perbudakan terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan yang memungkinkan dominasi terjadi</li> </ul>
6	<p>E-Jurnal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Dwibagus Lisandro</li> <li>- Mohammad Irvan Olii</li> </ul> <p>(2017)</p>	<p>Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktek perbudakan modern yang terjadi disebabkan adanya praktek penangkapan ikan ilegal yang kemudian menciptakan tuntutan bagi tenaga kerja dengan upah murah atau bahkan sama sekali tidak diupah.</li> <li>- Selain itu, lemahnya pengamanan perairan membuat praktek perdagangan orang lebih mudah tumbuh.</li> </ul>
7	<p>E-Jurnal :</p> <p>Yanti Amelia Lewerissa</p> <p>(2018)</p>	<p>Hubungan <i>Illegal Fishing</i> dengan Masuknya Imigran Gelap sebagai Bentuk Kejahatan Lintas Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indonesia sebagai negara kepulauan membuatnya memiliki banyak pintu masuk salah satunya lewat laut. Melaluinya</li> </ul>

			<p>kapal-kapal asing melakukan IUU, sekaligus menyelundupkan pekerja-pekerja asing yang berakhir menjadi budak</p> <p>-Menjelaskan <i>illegal fishing</i> sebagai kejahatan lintas negara yang berbahaya dan harus diakui PBB</p>
8	<p>E-Jurnal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- David Tickler</li> <li>- Jessica J. Meeuwig</li> <li>- Katharine Bryant</li> <li>- Fiona David</li> <li>- John A. H. Forrest</li> <li>- Elise Gordon</li> <li>- Jacqueline Joudo Larsen</li> <li>- Beverly Oh</li> <li>- Daniel Pauly</li> <li>- Ussif R. Sumaila</li> <li>- Dirk Zeller</li> </ul> <p>(2018)</p>	<p>Modern Slavery and the Race to Fish</p>	<p>-Peningkatan permintaan akan hasil laut oleh industri pengolahan makanan laut menjadi faktor yang signifikan bagi peningkatan jumlah praktek perbudakan khususnya budak-budak yang dipekerjakan di laut lepas</p>
9	<p>Tesis :</p> <p>Anastazia N Wattimena</p> <p>(2019)</p>	<p>Perbudakan Modern dalam Perspektif Geopolitik</p>	<p>- Menganalisis pengaruh <i>setting</i> geografis terhadap pertumbuhan dan perkembangan praktek perbudakan modern yang secara langsung mengindikasikan Indonesia secara geografi politik rentan untuk dijadikan lokasi tujuan perdagangan orang yang berujung perbudakan bagi <i>non-state actor</i> seperti</p>

			yang terjadi di wilayah Benjina, Kepulauan Aru
--	--	--	--

## 1.6 Kerangka Teori

Prof. Dr. Mochtar Mas'oe'd dalam buku berjudul *Ilmu Hubungan Internasional ; Disiplin dan Metodologi*, menjelaskan bahwa berteori merupakan pekerjaan penonton. Teori sendiri berdasar dari bahasa Yunani, yang kurang lebih berarti “melihat”, secara umum teori berarti pandangan atau persepsi seputar apa yang terjadi<sup>17</sup>. Teori sendiri diharapkan akan menjawab tiga pertanyaan besar berkaitan dengan sebuah peristiwa, yakni memberikan deskripsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan memprediksikan apabila ada kemungkinan peristiwa yang sama akan terjadi lagi di masa yang akan datang<sup>18</sup>.

Dalam menjelaskan mengapa perbudakan manusia terjadi di wilayah Benjina-Kepulauan Aru, penulis menggunakan teori dan konsep seperti yang akan dijelaskan di bawah ini.

### a. Perspektif Geografi Politik

Geografi politik merupakan sub disiplin yang sangat berkaita dengan geografi manusia atau *human geography*, dan mulai berkembang sejak awal abad ke-20. ahli dan pemikir geografi politik kemudian bermunculan sejak tahun 1970. Berikut di bawah ini adalah fase perkembangan studi geografi politik.

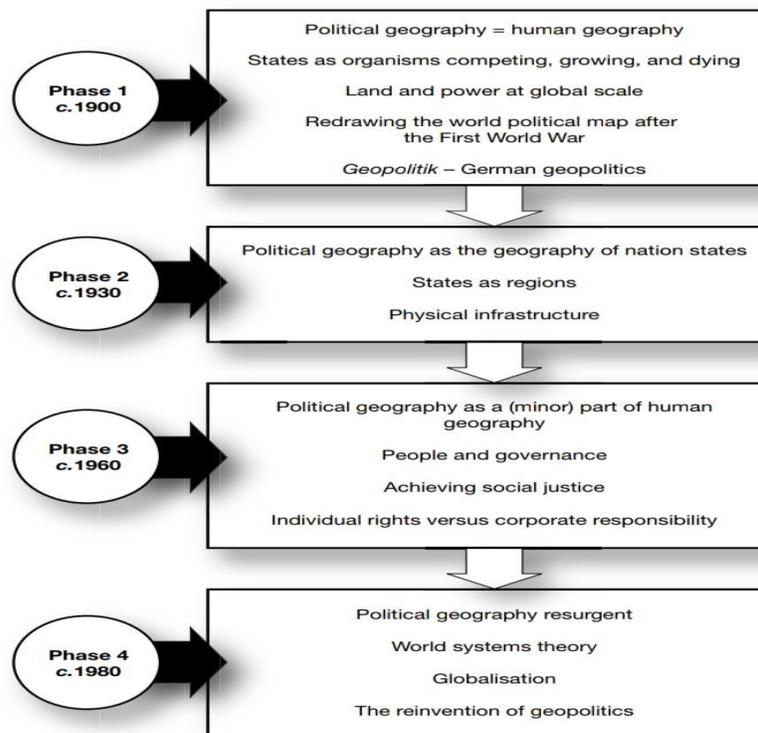
---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Mohtar Mas'oe'd, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional ; Disiplin dan Metodologi*, LP3S : Yogyakarta

<sup>18</sup> *Ibid*

**Gambar 1.1**

**Fase Perkembangan Pemikiran Geografi Politik**



Sumber : *Political Geography*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Mark Blacksell, 2006, *Political Geography*, Routledge : New York

Dari gambar di atas terlihat bahwa hasil perkembangan dari pemikiran geografi politik melahirkan perspektif geopolitik yang mana lebih banyak membahas tentang ekspansi teritori. Jika ahli dan pemikir geografi politik mulai bermunculan secara signifikan di tahun 1970an, maka hal itu tidak lepas dari jasa Friedrich Ratzel seorang ahli geografi dari Jerman yang pada tahun 1897 melalui karyanya *Politische Geographie* memperkenalkan pemikiran tentang hubungan antara manusia dari daratan yang ditinggalinya<sup>20</sup>.

Guntram H. Herb menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul *Politics of Political Geography* bahwa konsep geografi politik mendekati negara dengan tiga cara yakni pertama konsep ini memfasilitasi proses negara memaksimalkan kekuasaannya terhadap spasial atau ruang. Kedua, terkait persoalan memelihara dan mengelola teritori, dan ketiga mengkritisi dan mempertanyakan setiap tindakan negara terkait bidang keruangnya<sup>21</sup>. Konsep penting dalam kajian geografi politik meliputi kekuasaan, teritori, batas, skala, dan tempat. Di samping itu yang paling penting adalah menarik benang merah dari perbedaan yang terletak pada geopolitik dan geografi politik atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Political Geography* karena meskipun sangat berkaitan erat namun ada perbedaan nyata antara keduanya yang kadang kala penempatannya tidak tepat.

Herb menjelaskan bahwa geopolitik berakar dari ambisi NAZI Jerman untuk menguasai dunia, karena dalam pertimbangan salah satu penasihat Hitler saat itu yakni Friedrich Ratzel yang juga merupakan seorang pakar geografi melihat pentingnya pendudukan negara dalam rangka ekspansi atau perluasan wilayah teritorial. Sedangkan geografi politik lebih menekankan pada pertanggung jawaban negara dalam mengelola ruang dan teritorinya<sup>22</sup>. Geopolitik merupakan bagian dari studi geografi yang berkecimpung seputar kekuasaan, dan perebutan kekuasaan, yang sangat berhubungan dengan imperialisme.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>21</sup> Guntram H. Herb, 2007, *Politics of Political Geography*, Sage Publications Ltd : London, diakses pada 20 Oktober 2019 20.49 WIB, dalam [https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/19015\\_4952\\_Cox\\_Ch01.pdf](https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/19015_4952_Cox_Ch01.pdf)

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 23

Pemikiran geografi politik sudah lama muncul setidaknya diawali dari dua geograf yakni Herodotus di abad ke-4 dan seorang intelektual Islam terkenal Ibnu Khaldun di abad ke-14 yang memprediksi kejatuhan dan kemajuan kekhalifan dengan interaksi antara pejuang suku nomaden dan penduduk setempat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa penakluk sebuah negara akan kehilangan kemampuan untuk memproyeksikan kekuasaannya apabila telah menduduki sebuah wilayah dengan karakter populasi yang cenderung setia<sup>23</sup>. Geografi politik secara umum akan dibedah berdasarkan tiga bagian besar yakni teritori, negara, dan perubahan sosial.

### ***Konsep Kajian Teritori***

Konsep geografi politik dimulai dengan pengertian paling sederhana seputar teritori dan teritorialitas atau *territory* dan *territoriality*. Segala jenis aktifitas yang dilakukan untuk mempertahankan teritori tersebut dikenal sebagai teritorialitas. Kajian politik geografi berkuat seputar teritori dan teritorialitas karena keduanya akan sangat berhubungan dengan kekuasaan *power* dan ruang *space*. Teritori berarti wilayah atau area yang dikontrol, dipertahankan, diperebutkan, yang dilakukan melalui teritorialitas. Sederhananya, teritori merupakan objek, sedangkan teritorialitas adalah aktifitasnya (mengontrol, mempertahankan, memperebutkan)<sup>24</sup>. Lebih dalam lagi, konsep geografi politik sangat erat berkaitan dengan geografi manusia atau *human geography* karena yang memberi respon atas fenomena yang terjadi pada teritori adalah manusia.

Jika teritorialitas merupakan kumpulan strategi untuk mempertahankan teritori maka terdapat tiga persoalan penting yang akan sering ditemukan dalam satu teritori. Pertama, penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar area perbatasan antar dua negara adalah kelompok masyarakat yang paling rentan karena sering terjadi kekaburan atau ketidakjelasan terkait batas negara. Penduduk yang berdiam di wilayah terluar dan terdepan sering terlambat mendapat perhatian negara<sup>25</sup>. Hal ini seperti yang terjadi pada penduduk Indonesia yang berada di kabupaten Nunukan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>24</sup> Kevin R. Cox, 2002, *Political Geography : Territory, State, and Society*, Blackwell Publishers : United Kingdom

<sup>25</sup> Mark Blacksell, *Op.Cit.*, hal. 18

provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan negara bagian Malaysia Sabah. Di mana kedua negara telah terlibat dalam konflik perebutan tapal batas sejak tahun 1973<sup>26</sup> karena ketidakjelasan batas seperti yang disebutkan di atas.

Kedua wilayah yang menjadi teritori harus dibicarakan, diresmikan, diumumkan, dan harus digambarkan jelas dalam sebuah peta<sup>27</sup>. Hal ini akan menghindarkan negara dari klaim atas teritori dari negara lain. Teritori merepresentasikan kekuasaan, karena kekuasaan negara terbatas hanya di dalam wilayah teritorinya jadi sangat penting bagi negara untuk mengetahui dan mengumumkan serta mendapat pengakuan dari dunia internasional tentang wilayah kedaulatan dalam teritorinya. Agar tidak dicaplok atau diambil atau diakui negara lain sebagai bagian dari teritorinya.

Isu ketiga yang sering muncul terkait dengan pemeliharaan dan penjagaan keamanan di wilayah teritori terutama di bagian terdepan dan terluar dari teritori. Kebutuhan akan pengamanan baik dari tentara maupun polisi sangat esensial karena penjagaan yang lemah di wilayah terluar sekaligus yang sulit dijangkau akan menciptakan kerentanan wilayah tersebut terhadap berbagai tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi biasanya berhubungan dengan masuknya warga negara asing atau migran tanpa izin ke wilayah negara lain<sup>28</sup>.

Geografi politik menekankan pada segala jenis aktifitas yang dilakukan di dalam ruang atau *space* teritori dari negara tersebut. Isu-isu yang termasuk dalam kajian teritori terdiri mulai dari isu kuota impor, pembatasan jumlah masuknya imigran, kemudian sistem zonasi dalam pulau atau antar pulau juga masuk ke dalam bentuk-bentuk kajian teritori. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara geografi politik dan geografi manusia atau *human*

---

<sup>26</sup> Diakses pada 28 Oktober 2019 9.44 WIB, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/09/07/20372561/hubungan-malaysiaindonesia-masih-terganjal-perkara-batas-negara?page=all>

<sup>27</sup> Mark Blacksell, *Op.Cit.*, hal. 18

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 19

*geography* karena geografi politik membahas tentang mobilitas manusia yang mana termasuk dalam kategori *human geography*<sup>29</sup>.

Secara umum penting diketahui bahwa studi geografi sendiri meliputi kajian tentang objek, aktifitas, lembaga atau institusi dari perspektif hubungan antara ketiganya dengan ruang atau lokasi atau wilayah baik eksternal maupun internal yang mana juga menyangkut hubungan aksesibilitas antara ketiga aktor di atas. Produksi objek seperti pabrik, perumahan, bandara, jembatan, bahkan reproduksi manusia itu sendiri sangat bergantung pada pergerakan bahan mentah yang diperuntukan bagi produksi pabrik dan bahan pergerakan uang atau kapital untuk membeli bahan mentah, dan yang paling penting adalah buruh sebagai penggerak sistem produksi<sup>30</sup>.

Setiap individu memiliki kecenderungan untuk terus berpindah tempat, tingkat mobilitas penduduk juga semakin tinggi tidak hanya dalam bentuk berkunjung lintas teritori namun juga menetap dalam beberapa teritori secara bergantian. Tidak hanya persoalan tempat tinggi, contoh berbagai perusahaan yang kemudian membuka pabrik di lokasi lain dari area di mana perusahaan induknya bertempat. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebuah perusahaan untuk membuka cabang perusahaannya di berbagai wilayah lintas teritori. Namun ada juga individu, komunitas masyarakat, atau bahkan perusahaan yang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lokasi di mana awalnya mereka berada sehingga berpindah tidak menjadi sebuah opsi yang mudah untuk dilakukan karena merasa lebih nyaman dan diterima di lokasi yang sudah sejak awal dikenal atau terasa familiar<sup>31</sup>. Segala cara yang dilakukan untuk mengembangkan dan mempertahankan teritori merupakan bagian dari strategi teritori yang mana dapat menjadi ancaman bagi strategi teritori dari negara lain. Namun yang terpenting adalah isu-isu terkait perpindahan, menetap, kemudian mobilitas menjadi alasan bagi munculnya isu atau permasalahan teritorial.

### ***Konsep Kajian Negara***

---

<sup>29</sup> Kevin R Cox, *Op.Cit.*, hal. 4

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 5

Aktifitas yang berkaitan dengan teritori yang disebut sebagai teritorialitas sangat erat hubungannya dengan instansi negara. Bagaimana tidak, negara memiliki kuasa penuh atas pengaturan teritori dari sebuah negara. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas segala pergerakan yang terjadi di seluruh perbatasan di negara, baik pergerakan manusia, uang, dan komoditas. Negara bisa saja melarang atau membatasi impor guna melindungi industri tertentu dari kompetisi dengan pihak asing. Negara juga dapat membatasi masuknya imigran dalam rangka melindungi perkembangan negara<sup>32</sup>.

Ada korelasi hubungan yang sangat jelas antara negara dan kekuatan masyarakat yang terkait dengan kekuasaan atas geografi. Kekuasaan terdiri dari berbagai bentuk, yang juga sangat penting di era sekarang ini yakni kekuatan uang. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa rakyat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan uang misalnya pajak, pembayaran denda, pun negara menggunakan kekuasaannya dalam mengelola uang rakyat untuk membayar subsidi. Di luar itu, korporasi besar tidak segan-segan untuk mengeksploitasi pekerja karena uang. Semua anggota legislasi yang terpilih adalah kumpulan orang-orang yang kaya-raya yang kemudian memiliki akses untuk mengupayakan terpilihnya mereka untuk duduk di kursi legislasi. Hubungan kekuatan uang atau kapital dengan letak geografis sederhananya adalah keluarga yang tinggal di perumahan elit karena mampu membayar harga tanah dan rumah yang mahal sedangkan keluarga dengan kondisi perekonomian yang tidak mencukupi akan memilih tinggal di desa yang mana harga tanah dan rumah cenderung lebih murah.

Negara memiliki kekuatan dalam pembentukan norma, yang bisa dimulai dari pendidikan karena tentu saja sistem dan atauran-aturan dalam pendidikan diatur oleh negara. Nilai-nilai seperti tidak boleh terlambat, atau harus mengikuti upacara bendera setiap pagi di hari senin, merupakan cara-cara negara membangun norma melalui pendidikan. Hingga akhirnya kita menjadi terbiasa dan meyakini bahwa tidak terlambat merupakan bagian dari kebiasaan yang baik, mengikuti upacara bendera karena sebagai wujud cinta pada bangsa, yang keduanya merefleksikan norma yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 7

hidup dalam masyarakat. Setiap peraturan yang dibuat kemudian dapat disesuaikan dengan keinginan negara sesuai kepentingan mereka.

Kehadiran negara tidak selalu merata di seluruh wilayah di dalam sebuah teritori negara. Ada lokasi atau wilayah-wilayah yang sangat sedikit merasakan kehadiran negara atau partisipasi negara dalam hal pembangunan, misalnya di wilayah-wilayah yang secara umum terpencil dan terisolasi. Kelemahan kekuatan dan kekuasaan negara tidak hanya dalam hal pembangunan, juga pada kekuatan negara untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat menjadi semakin lemah terutama di negara-negara yang cenderung tidak stabil misalnya saja di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara kurang berkembang atau *less develop country*<sup>33</sup>.

Strategi teritorialitas selalu menggunakan kekuasaan atau power, dalam beberapa kasus bisa juga membutuhkan secara langsung kekuasaan negara. Bagian paling menarik dari kekuasaan negara dalam membentuk strategi teritorialitas adalah karakter dari teritori itu sendiri yang memiliki keunikan di tiap masing-masing negara. Seseorang dapat hidup bertetangga dalam satu kota atau kawasan perumahan yang sama namun kenyataannya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Interaksi lintas batas teritori dimungkinkan terjadi tidak lepas dari strategi teritorialitas itu sendiri yang melonggarkan atau mengencangkan peraturan terkait dengan masuk keluarnya penduduk lintas negara. Keterikatan manusia secara geografi cukup menguntungkan karena akan meminimalisir kecenderungan terjadi perang.

### ***Kajian Proses Sosial dan Geografi Politik***

Bagaimana hubungan antara proses sosial dan geografi politik, sesungguhnya sangat erat. Kehidupan sosial yang dialami oleh masyarakat sangat dekat hubungannya dengan alam, interaksi antara manusia dan alam. Hubungan dengan alam selalu dimulai dengan interaksi antara manusia (seperti dalam proses produksi), begitu juga dengan lingkungan kita sendiri (seperti dalam proses sosialisasi)<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 11

Seiring berjalannya waktu, keterkaitan kepada lingkungan alam, dan interaksi dengan sesama manusia semakin berkurang dengan tergantikan dengan keterkaitan kepada uang, modal, kapital, harta, properti, gaji atau upah, nilai, perdagangan, keterkaitan akan segala hal yang bersifat materil, seperti yang terjadi pada tipe masyarakat kapitalistik yang sangat konsumtif dan eksploitatif serta kebutuhan akan buruh-buruh upah rendah yang tinggi tentu saja.

Sistem kapitalisme dan negara memiliki hubungan yang erat dengan geografi politik, di mana sistem kapitalisme yang ingin diterapkan di dalam sebuah negara membutuhkan penyesuaian secara geografis, di antaranya :

1. Negara dibutuhkan untuk mendukung sistem kapitalistik bukan melawannya dengan cara membangun infrastruktur fisik seperti jembatan, Bandar udara, pelabuhan, jalan layang, dsb.

2. Penanaman nilai-nilai tentang pentingnya uang, kerja keras, kepemilikan properti pribadi, serta status keamanan finansial. Menanamkan nilai-nilai seperti pentingnya hidup dengan ambisi, dsb<sup>35</sup>.

3. Meminimalisir hambatan geografis dalam proses produksi seperti membuka cabang-cabang usaha di lokasi pengambilan sumber daya dan mendatangkan pekerja upah murah untuk menekan biaya produksi.

Pemahaman mengenai bagaimana kapitalisme mencoba untuk mensubordinasikan segalanya termasuk budaya dan negara untuk mencapai tujuannya merupakan hal yang esensial untuk dipelajari agar kita dapat mengerti geografi politik dunia saat ini. Perebutan ruang, wilayah, teritorial yang merupakan isu-isu geografi politik terjadi tidak lain karena sistem kapitalistik itu sendiri<sup>36</sup>. Kota, wilayah, atau provinsi memang memiliki otonomi sendiri namun apabila sudah bersinggungan dengan kepentingan kapitalistik, maka otonomi menjadi terpinggirkan misalnya sebuah taman nasional yang seharusnya dilindungi namun apabila di bawah taman nasional tersebut terdapat sumber minyak maka kepentingan perlindungan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 15

akan kalah dengan aktifitas pengeboran minyak karena menghasilkan uang, sesuai dengan doktrin kapitalisme yang menuhankan uang.

### ***Konsep Jarak dalam Hubungan antar Negara***

Jarak dalam studi geografis memiliki arti yang cukup signifikan karena secara langsung akan mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan pertahanan. Jarak dapat bersifat alami dan artifisial atau jarak buatan. Jarak juga terdiri atas dua jenis yakni jarak absolut dan jarak relatif, jarak absolut merupakan jarak yang diukur dari udara sedangkan jarak relatif merupakan jarak yang sewaktu-waktu dapat berubah karena perkembangan zaman, teknologi, informasi dsb<sup>37</sup>.

Jarak relatif terdiri atas jarak tempuh, jarak ekonomi, jarak sosial, dsb<sup>38</sup>. Jarak tempuh misalnya jarak dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang mungkin sebelumnya hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, seiring pembangunan jalan dan transportasi kemudian dapat ditempuh dengan menggunakan kapal atau pesawat yang mana akan mempengaruhi durasi tempuh. Sedangkan yang dimaksud dengan jarak sosial adalah perbedaan status sosial antara masyarakat<sup>39</sup>. Pembahasan mengenai jarak menjadi penting karena jarak merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan apakah suatu wilayah tergolong dalam wilayah yang terisolasi, semakin sebuah wilayah terisolasi maka akan mempengaruhi kebijakan yang harus diterapkan di sana.

Dalam tulisan Alan K. Henrikson (2002), dia menjelaskan bahwa ada setidaknya tiga klasifikasi jarak *distance* terkait dengan asumsi geografis<sup>40</sup>. Tiga klasifikasi jarak tersebut antara lain, pertama *gravitational distance* jarak gravitasi yang berarti negara dengan ukuran yang lebih besar akan cenderung memiliki potensi kekuatan dan pengaruh yang lebih besar pula.

---

<sup>37</sup> Drs. Gunardo R.B., M.Si., 2014, *Geografi Politik*, Penerbit Ombak : Yogyakarta

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Alan K. Henrikson, *Distance and Foreign Policy : A Political Geography Approach*, International Political Science Review Vol. 23 (4), 2002, hal. 437-466, diakses pada 3 Februari 2019 09.59 WIB, dalam <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192512102023004007>

Kedua, *Topological distance* jarak topografi yang berarti dua negara secara geopolitik terlihat sangat berjauhan jaraknya apabila diantara kedua negara terdapat negara-negara lain yang terbentang diantara keduanya (tidak peduli besar kecilnya ukuran negara *intervening*) meskipun kedua negara berdasarkan lokasi berdekatan sebaliknya dua negara secara geopolitik dilihat berdekatan apabila tidak ada negara lain yang berada diantara kedua negara tersebut bahkan apabila secara jarak kedua negara berjauhan.

Ketiga, *attributional distance* jarak atribut, yang mana mengasumsikan dua negara yang memiliki ideologi yang sama meskipun terbentang dengan jarak yang jauh secara geografis tetap akan terasa dekat, sebaliknya apabila dua negara secara geografis dekat tapi memiliki ideologi yang berbeda misalnya, antara negara demokrasi dan negara otoriter maka keduanya akan berjauhan.

Apabila menyangkut isu keamanan maritim, maka geopolitik pada dasarnya mempengaruhi kebijakan pengamanan maritim, regulasi, langkah dan operasi, serta bagaimana negara menggunakan pertimbangan geografis dalam strategi keamanan maritim. Isu keamanan maritim pun beragam, mulai dari pembajakan kapal, sampai isu perbudakan awak kapal<sup>41</sup>.

Oleh sebab itu pertimbangan geografis sangat penting terutama dalam memformulasi kebijakan terkait pengamanan zona maritim atau wilayah perairan suatu negara. Negara juga dapat diasumsikan sebagai negara yang rapuh ditinjau salah satunya dari situasi geografis negara tersebut. Dalam tulisan Griffith (1998) setidaknya terdapat 4 faktor yang secara signifikan memiliki dampak langsung bagi keamanan sebuah negara, salah satu diantaranya adalah faktor geografi<sup>42</sup>. Dalam tulisan Griffith (1998) juga dijelaskan setidaknya terdapat 6 faktor lainnya yang

---

<sup>41</sup> Basil Germond, *The Geopolitical Dimension of Maritime Security*, Marine Policy Vol. 54, 2015, hal. 137-142, diakses pada 28 Januari 2019 17.49 WIB, dalam [https://ac.els-cdn.com/S0308597X14003509/1-s2.0-S0308597X14003509-main.pdf?\\_tid=1b89ecd1-cf33-4389-9bf8-78b24d9f355b&acdnat=1548588905\\_c00659074ea4936ec840757d1f596527](https://ac.els-cdn.com/S0308597X14003509/1-s2.0-S0308597X14003509-main.pdf?_tid=1b89ecd1-cf33-4389-9bf8-78b24d9f355b&acdnat=1548588905_c00659074ea4936ec840757d1f596527)

<sup>42</sup> Ivelaw L. Griffith, *Caribbean Geopolitics and Geonarcotics : New Dynamics, Same Old Dilemma*, Naval War College Review Vol. 51 No. 2, Spring 1998, hal. 47-67, diakses pada 28 Januari 2019 18.28 WIB, dalam <https://www.jstor.org/stable/44638138>

dapat berkontribusi dalam vulnerabilitas negara dalam konteks keamanan, dan salah satunya adalah kepemilikan atas sumber daya yang memiliki nilai tinggi<sup>43</sup>.

Indonesia masuk dalam kategori negara yang secara keamanan rapuh *vulnerable* dalam arti memiliki sumber daya perikanan yang bernilai tinggi dalam jumlah berlimpah khususnya yang terdapat di wilayah Indonesia Timur yakni kepulauan Aru-Maluku, selain itu letak dari wilayah Kepulauan Aru yang secara geografis sangat strategis sebagai lokasi tujuan *human trafficking* seperti perbudakan, di mana kepulauan tersebut berada di ujung timur dengan gugusan pulau-pulau kecil dengan perairan yang sangat luas dan langsung berhadapan dengan teritorial negara lain.

Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan isolasi geografis di wilayah Benjina, maka apabila ditinjau dalam perspektif geografi politik di mana kebijakan politik diambil berdasarkan pertimbangan unsur-unsur geografis<sup>44</sup> maka kebijakan yang diambil negara belum terlihat optimal dalam mengamankan lokasi Benjina. Apabila suatu lokasi terisolasi dan menyimpan begitu banyak sumber daya kelautan dan perikanan semestinya, pengamanannya justru harus lebih ketat.

Perairan Indonesia secara umum strategis terutama bagi negara-negara ASEAN sebagai tujuan penangkapan ikan sekaligus lokasi perbudakan karena wilayah Indonesia sejauh ini selain paling kaya akan sumber daya perikanan nomor dua setelah Cina. Perairan Indonesia terutama di wilayah timur bebas dari sengketa dengan negara lain, tidak seperti wilayah perairan Vietnam yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang dalam sengketa. Jadi secara umum, dapat disimpulkan bahwa perairan Indonesia Timur khususnya wilayah Perairan Kepulauan Aru baik dari segi letak geografis maupun kekayaan sumber daya, memenuhi syarat sebagai wilayah impian bagi destinasi kapal-kapal asing yang melakukan *human trafficking* dan perbudakan.

Pentingnya pertimbangan geografis juga disepakati oleh Andrew Crane, yang menggunakan indikator geografis sebagai salah satu pertimbangan alasan tumbuhnya

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 48

<sup>44</sup> Djalal, *Op. Cit.*, hal.

perbudakan modern di dalam suatu wilayah<sup>45</sup>. Andrew Crane, memformulasikan teori perbudakan modern sebagai praktek manajemen dengan menggunakan perspektif geografi sebagai salah satu indikator di dalamnya. Dalam indikator geografis yang disampaikan Crane, setidaknya ada dua bagian dari perspektif geografis yang dikaji yakni pertama *geographical isolation*, dan yang kedua adalah *physical, political, dan pshycological distance*.

Pertama tentang isolasi geografis, menurut Crane secara umum sumberdaya alam yang menjadi modal dasar industri besar seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, serta pertambangan biasanya justru terdapat paling banyak di wilayah-wilayah pedalaman yang spesifik, umumnya merupakan wilayah yang terpencil, terisolir, serta jauh dari akses informasi. Lokasi yang seperti ini, juga jauh dari sumber keberadaan buruh atau pekerja. Kedua, isolasi geografi menjauhkan para budak dari jangkauan akan fasilitas hukum. Jauhnya jangkauan para pekerja dengan akses informasi akan mempercepat proses institusionalisasi budak di wilayah tersebut. Wilayah yang terisolasi ini juga memberikan *cultural-cognitive effect*. Ketidakterhubungan budak dengan komunitas diluar mereka membuat mereka perlahan-lahan merasa bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap mereka merupakan sebuah budaya yang wajar<sup>46</sup>.

Kedua, berkenaan tentang Jarak fisik, psikologi, dan politik *physical, political, atau psychological distance* yang berarti jarak yang jauh dari rumah membuat para budak cepat atau lambat akan merasa terisolasi dengan sendirinya baik secara fisik maupun psikologi yang akhirnya menutup pikiran mereka dari kesempatan untuk menyelamatkan diri. Di samping itu, upaya untuk melarikan diri akan membutuhkan biaya yang besar yang tentu saja tidak mereka miliki, juga keterbatasan bahasa dari satu wilayah dengan wilayah lain yang akan semakin menyulitkan mereka untuk membebaskan diri dan akhirnya terus terperangkap. Kondisi seperti ini diistilahkan sebagai *social death* kematian sosial oleh Orlando Patterson. *Social death* sendiri

---

<sup>45</sup> Crane, *Op.Cit.*, hal. 56

<sup>46</sup> *Ibid*

kurang lebih berarti terisolasinya manusia dari tradisi dan hubungan sosial normal yang dahulu mereka miliki<sup>47</sup>.

## **b. Perspektif Tata Kelola Provinsi Kepulauan**

Reis dan Hayward (2013) menjelaskan bahwa pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan atau *oceanic islands*<sup>48</sup> yang mana terpisah dari pulau induknya memang seharusnya memiliki tata kelola kebijakan yang berbeda dengan wilayah yang bukan *oceanic islands* atau dalam konteks Indonesia, provinsi yang berbasis kepulauan atau provinsi yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang dikelilingi lautan terbuka harus diterapkan sistem yang berbeda dengan provinsi yang berbasis daratan. Pulau-pulau *oceanic* secara alami memiliki karakter yang terisolasi yang mana harus mendapatkan penanganan yang berbeda karena tantangan yang melekat pada jenis gugusan pulau-pulau kecil tersebut. Sayangnya, kebanyakan negara yang memiliki provinsi kepulauan justru menseragamkan sistem kelola pemerintahan dan kebijakan bagi semua provinsi baik yang berbasis daratan maupun yang berbasis lautan yang mana justru akan mendegradasi kesempatan kesejahteraan bagi provinsi kepulauan karena ke eksklusifitasannya yang dikelilingi oleh laut tidak dioptimalkan.

Penerapan tata kelola provinsi kepulauan berkiblat pada konsep negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS III tahun 1982<sup>49</sup>. Negara kepulauan sendiri sesuai dengan pasal 46 berarti negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau beberapa kepulauan yang juga dapat melibatkan pulau-pulau lainnya. Kepulauan sendiri berarti gugusan pulau, dan laut yang mengitarinya.

Karel Albert Ralahalu, Gubernur Maluku periode 2008-2013<sup>50</sup> juga menegaskan keharusan membuat sistem tata kelola yang berbeda antara provinsi berbasis

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>48</sup> Arianne Reis, Philip Hayward, *Pronounced Particularity : A Comparison of Governance Structure on Lord Howe Island and Fernando de Noronha*, *Island Studies Journal* Vol. 8 (2), tahun 2013, pp. 285-298, diakses pada 24 September 2019 17.11 WIB, dalam [https://www.researchgate.net/publication/281253476\\_Pronounced\\_Particularity\\_A\\_Comparison\\_of\\_Governance\\_Structures\\_on\\_Lord\\_Howe\\_Island\\_and\\_Fernando\\_de\\_Noronha](https://www.researchgate.net/publication/281253476_Pronounced_Particularity_A_Comparison_of_Governance_Structures_on_Lord_Howe_Island_and_Fernando_de_Noronha)

<sup>49</sup> Diakses pada <http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html>

<sup>50</sup> Diakses pada 24 September 2019 17.27 WIB, dalam <https://indonesiatimur.co/2013/09/15/banyak-tangisan-saat-berpamintan/>

kepulauan dan provinsi yang berbasis daratan. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih saja terfokus pada daerah-daerah kontinental atau daerah yang berbasis daratan dan kurang menonjolkan perhatian pada pembangunan wilayah berbasis kepulauan dengan luas lautan yang signifikan<sup>51</sup>. Ide pembangunan provinsi berbasis kepulauan ini sebenarnya berkiblat pada konsep negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS III *United Nations Convention on Laws of the Sea* tahun 1982<sup>52</sup>.

Ralahalu (2013) menyatakan bahwa sudah seharusnya pembangunan provinsi Maluku menggunakan pendekatan pembangunan gugus pulau, pendekatan pembangunan laut pulau, juga pintu jamak.

## **1.7 Hipotesa**

Jadi analisis sementara yang dapat diambil pada penelitian ini adalah, alasan mengapa praktek perbudakan modern yang terjadi di desa Benjina, perairan Kepulauan Aru, Maluku-Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari aspek geografis, wilayah perairan Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah perairan terdepan Indonesia yang sumber daya perikanan yang sangat berlimpah, dengan wilayah yang sangat rendah keterjangkauannya
2. Wilayah yang secara geografis memiliki keterjangkauan yang rendah (terisolasi) memerlukan kebijakan khusus yang mana berorientasi pada pembangunan ekonomi dan transportasi agar wilayahnya menjadi terjangkau. Rendahnya keterjangkauan dan pengamanan pada daerah yang kaya sumber daya tapi terisolasi akan menciptakan peluang bagi tumbuhnya praktek tindak pidana baik *IUU Fishing* maupun perbudakan

## **1.8 Metodologi Penelitian**

---

<sup>51</sup> Diakses pada 17.32 WIB, dalam *siwalimanews.com* edisi 23 Agustus 2013

<sup>52</sup> Diakses pada 24 September 2019 17.52 WIB, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tradisi yang tidak tunggal, sebaliknya tradisi kualitatif beragam tergantung pada aliran teori yang digunakan. Namun, meskipun aliran teori beragam, secara umum yang akan dijawab dalam metode kualitatif adalah alasan dibalik tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindakan sosial<sup>53</sup>. Metode penelitian kualitatif, termasuk ke dalam paradigma *Interpretivism* (istilah yang digunakan Piergiorgio Corbetta dalam bukunya *Social Research*)<sup>54</sup> atau secara umum kita kenal sebagai aliran anti-positivisme. Paradigma anti-positivisme ini berakar dari tradisi pemikiran Jerman, paradigma ini sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir seperti Plato. Sifat pemikiran ini lebih humanistik, dan realistik khas Plato yang mana kemudian memberikan ide bagi Kant dan Hegel sehingga terbentuklah tradisi pemikiran anti positivisme yang menjadi dasar metode kualitatif<sup>55</sup>.

Penelitian akan menggabungkan antara studi literatur atau *library research* dan wawancara singkat dengan pihak kedua yang tinggal atau pernah mengunjungi wilayah yang menjadi objek penelitian. Data yang diambil lebih banyak bersumber dari berita online baik nasional maupun kantor berita online internasional, beberapa kutipan wawancara selain diambil dari sumber kedua yang diketahui oleh penulis juga diambil dari hasil-hasil wawancara yang dilakukan oleh kantor berita yang meliput dan melakukan investigasi atas kasus perbudakan yang terjadi di Benjina misalnya Associated Press, dan beberapa kutipan wawancara yang dilakukan oleh *International Organization for Migration* saat menginterogasi para korban.

## 1.9 Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif di mana jenis penelitian ini akan menjawab pertanyaan “mengapa” suatu peristiwa terjadi. Dengan menggunakan

---

<sup>53</sup> Sanapiah Faisal, 2007, *Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial ; Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta

<sup>54</sup> Piergiorgio Corbetta, 2003, *Social Research*, SAGE Publications : London

<sup>55</sup> Sanapiah Faisal, *Op.Cit.*, hal. 58

model penelitian eksplanatif diharapkan penulis dapat menjawab mengapa perbudakan modern terjadi di wilayah Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer direncanakan akan diambil melalui observasi langsung dan wawancara, sedangkan data sekunder akan diambil melalui *library research*. Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan adalah teknik induktif di mana, fenomena akan dijelaskan dari fakta-fakta khusus hingga menghasilkan kesimpulan secara umum.

### **1.10 Jangkauan Penelitian**

Untuk mencegah asumsi yang melebar berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menerapkan beberapa batasan kajian sesuai dengan cakupan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan membahas mengapa perbudakan modern terjadi di wilayah Kepulauan Aru-Maluku, dengan asumsi bahwa studi kasus yang akan diambil adalah kasus perbudakan modern yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources yang membuka cabang di wilayah desa Benjina, sedangkan para pekerja yang diperbudak adalah orang-orang yang ditugaskan untuk menangkap ikan di wilayah sekitar perairan kepulauan Aru dan Laut Arafura. Penulis akan meninjau permasalahan ini dalam dua konteks, yakni konteks geografis, di mana penulis akan menelaah pengaruh letak geografis desa Benjina dan Kepulauan Aru serta wilayah perairannya terhadap pertumbuhan praktek perbudakan modern. Kedua, penulis akan melihat bagaimana tata kelola kebijakan pengamanan maritim di wilayah Kepulauan Aru dan perairan Indonesia Timur. Penulis berpikir bahwa tata kelola kebijakannya masih jauh dari optimal sehingga berakibat pada muncul dan berkembangnya praktek perbudakan ABK yang dilakukan oleh PT. PBR.

Sepanjang proses penelitian tentu saja terdapat berbagai hambatan terutama berkaitan dengan observasi lapangan yang akan dilakukan. Provinsi Maluku yang terdiri dari gugusan pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil sangat mengandalkan transportasi laut untuk mobilisasi masyarakat. Sedangkan transportasi laut juga bergantung pada keadaan cuaca, angin, dan tinggi gelombang karena

biasanya penyeberangan antara pulau-pulau kecil hanya mengandalkan perahu-perahu boat sedang maupun kecil. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagi penulis untuk turun langsung ke wilayah Benjina karena saat periode pengerjaan tesis ini yakni April sampai September provinsi Maluku mengalami musim timur yakni cuaca di mana curah hujan tinggi, di Ambon sendiri setiap hari hujan turun, tinggi gelombang yang tidak menentu disertai angin kencang kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi penulis.

Hambatan kedua muncul dari beberapa laporan kasus yang seiring berjalannya waktu dihapus dari data base sumber karena jangankan waktu publikasi data yang sudah cukup lama. Misalnya beberapa laporan IOM terkait kasus di Benjina yang dipublikasikan melalui website resminya pada awal bulan februari 2019-April 2019 masih bisa diakses kemudian saat penulis mencoba mengakses kembali pada sekitar bulan September laporan-laporan tersebut sudah terhapus hal ini mengingat kasus perbudakan di Benjina juga sudah cukup lama berlalu yakni sekitar tahun 2015, yang mana sudah 4 tahun yang lalu jadi wajar saja jika beberapa data online sudah tidak lagi tersedia.

### **1.11 Sistematika Penulisan**

Tesis ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, yang terdiri dari :

- a. Bab I, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, serta metodologi penelitian yang akan digunakan.
- b. Bab II, penulis akan menjelaskan situasi dan kronologi terungkapnya perbudakan modern yang terjadi di Benjina, termasuk dampak buruk yang terjadi pada para korban. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana proses perekrutan warga negara asing hingga terjaring sebagai korban perbudakan penulis akan menjelaskan mengenai situasi geografis, hukum lokal dan nasional Indonesia yang terkait dengan perdagangan orang dan perbudakan. Akhirnya penulis juga akan menjelaskan mengenai eksistensi PT. PBR dan pelanggaran

yang telah dilakukan sebelumnya juga bagaimana masyarakat Benjina menilai isu kasus perbudakan yang terjadi di desa mereka.

- c. Bab III, penulis akan menjabarkan perspektif geografi politik secara umum, dan secara khusus tentang geopolitik Indonesia, posisi strategis Indonesia, dan bagaimana hukum Indonesia terkait perbudakan dan perdagangan orang. Penulis juga menjelaskan secara umum mengenai kebijakan apa saja yang sejauh ini telah diambil pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka IUU Fishing yang disinyalir menjadi latar belakang terjadinya perbudakan. bagian terakhir dari bab ini, penulis menjabarkan bagaimana komitmen ASEAN dan strateginya dalam merespon perdagangan orang yang terjadi di kawasan.
- d. Bab IV, penulis akan menjelaskan mengapa faktor geografi politik berpengaruh pada kebijakan pengamanan perairan wilayah Maluku yang berkontribusi dalam penciptaan peluang bagi tumbuhnya praktek perbudakan sekaligus menjelaskan tata kelola kebijakan pengamanan perairan di wilayah Indonesia Timur
- e. Bab V, pada bab terakhir penulis akan menyimpulkan seluruh hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya